



## Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021

Oleh

**Wasisto Raharjo Jati**

Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
wasisto.raharjo.jati@gmail.com

### Pendahuluan

Kualitas Demokrasi di Indonesia diperkirakan akan menurun di tahun 2021. Setelah melakukan kajian terhadap tiga laporan utama yakni 2020 *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 *Democracy Report*, ketiga laporan tersebut menunjukkan kalau kualitas demokrasi telah menunjukkan adanya pengurangan signifikan yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan.<sup>1</sup> Secara lebih spesifik, laporan *The Economist Intelligence Unit (EIU)* dan Indeks Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi Indonesia.<sup>2</sup> Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019.<sup>1</sup> Adapun laporan 2021 *Democracy Report* menempatkan Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan dalam demokrasi.<sup>2</sup> Secara ringkas, ketiga laporan demokrasi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola demokrasi Indonesia yang semula adalah demokrasi elektoral menuju pada “demokrasi yang cacat”. Pemahaman mendasar dari pergeseran ini adalah pemilu tidaklah menjamin akan melahirkan para pimpinan yang mampu menyejahterakan rakyat.<sup>3</sup>

Adanya pandemi covid-19 ini telah memberikan dampak luar biasa terhadap sektor sosial dan ekonomi. Dampak pandemi dalam kedua sektor tersebut telah memberikan adanya situasi yang tidak

1 Mohon untuk membaca laporan dari The Economist Intelligence Unit, ‘Democracy Index 2020 In Sicknes and in Health?’ dan Badan Pusat Statistik, ‘Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019’ untuk informasi lanjutan.

2 Mohon untuk membaca V-Dem Institute, ‘Autocratization Turns Viral: Democracy Report 2021’ untuk informasi lanjutan.



menentu dalam demokrasi di Indonesia sekarang ini. Secara lebih khusus, selain halnya kebebasan menurun yang berkembang menjadi praktik intoleransi, yang paling krusial adalah inkonsistensi dalam pemerintahan yang diakibatkan oleh para perilaku elit politik. Persoalan inkonsistensi dan juga intoleransi ini secara ringkas mencakup tiga poin utama, yakni semakin kuatnya pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil, segregasi sosial berbasis identitas ideologi, dan juga dinasti politik?.

## Analisis

Hal pertama yang penting untuk dicatat dalam menurunnya kualitas demokrasi adalah menguatnya peran aktif militer dalam peran sipil. Dibandingkan dengan Presiden SBY, Presiden Jokowi sangat mengandalkan peran aktif militer dalam berbagai sektor publik.<sup>4</sup> Faktor tersebut bisa terlihat dari berbagai macam sektor mulai dari pertanian, penanggulangan bencana alam, keamanan transportasi publik, dan menjadi bagian penting dari satuan tugas covid-19.<sup>5</sup> Terlepas dari sekian banyak kontribusi aktif militer, dalam berbagai hal tertentu, kecenderungan Presiden Jokowi untuk merehabilitasi perekonomian dengan cepat ini telah menempatkan tantara sebagai bagian penting dalam menciptakan tata tertib sosial. Namun demikian pengerahan militer untuk melakukan intervensi lebih jauh ke penegakan tata tertib ini kontradiktif dengan adanya prinsip netralitas tantara yang idealnya fokus kepada masalah pertahanan. Secara lebih lanjut, prakiraan adanya peran intelijen dalam mengawasi akun sosial media serta intimidasi lewat nomor tidak dikenal ditujukan kepada mereka yang vokal terhadap kebijakan pemerintahan sekarang. Kondisi ini menunjukkan kalau tantara dan polisi kini secara ketat mengawasi adanya interaksi sosial dalam dunia maya maupun dunia nyata. Hal ini yang sekiranya bisa berdampak pada turunnya kualitas demokrasi.

Hal kedua adalah semakin menguatnya hubungan tidak harmonis antara kubu nasionalis-pluralis dengan konservatif yang kemudian memicu adanya sentiment polarisasi. Sebelum adanya pandemi, relasi kedua kubu ini sebenarnya telah berada dalam posisi bersebrangan karena perbedaan preferensi politik dan ketiadaan akomodasi dari pemerintah inkumben terhadap kubu konservatif. Hal inilah kemudian berlanjut manakala terdapat rangkaian perilaku non-akomodatif selama masa pandemi misalnya saja pembubaran FPI maupun juga labelisasi "teroris" yang terkadang salah konteks. Adapun kubu Pemerintahan Presiden Jokowi yang banyak didukung oleh kubu nasionalis-pluralis sendiri telah tidak banyak memberikan akomodasi politik terhadap kubu islamis. Ketidadaan akomodasi politik yang seimbang itulah menyebabkan adanya gelombang kedengkian dan kemarahan politis. Hadirnya Habib Rizieq Shihab beserta para pengikutnya telah banyak diakui sebagai poros utama oposisi politik terhadap Presiden Jokowi. Habib Rizieq sendiri dengan cepat





bisa mendapatkan popularitas dengan menyedikan Islam sebagai alat politik oposisi sebagai payung besar oposisi. Secara ideal, adanya identitas ideologi tersebut adalah bagian dari *check and balances* dalam pemerintahan demokratis. Akan tetapi cara Presiden Jokowi dalam memperlakukan lawan politiknya itu sebenarnya menunjukkan adanya prinsip Jawa bahwa matahari itu tidak boleh kembar. Artinya, Presiden Jokowi entah itu akan merangkul atau bahkan mengeliminasi lawan politiknya. Praktik terakhir ini yang tentunya berlawanan terhadap demokrasi yang perlu adanya oposisi sebagai penyeimbang.

Adanya pandemi sekarang ini justru menjadi anugerah di balik musibah bagi koalisi Presiden Jokowi untuk mengeliminasi lawan-lawan politiknya dengan berlandaskan pada aturan protokol kesehatan.<sup>6</sup> Selain halnya Habib Rizieq dan para pengikutnya, hal ini juga berdampak pada aktivis mahasiswa yang tidak sependapat dengan berbagai macam undang-undang terbaru misalnya revisi UU KPK dan UU Cipta Lapangan Kerja. Semakin kuatnya tekanan politik namun semakin akomodatif bagi pendukung Jokowi dalam penegakan aturan protokol kesehatan selama masa pandemi berpotensi membuat lawan-lawan politik Presiden Jokowi akan semakin terkonsolidasi. Disinyalir kemungkinan adanya huru-hara politik akan terjadi di ruang publik. Dengan semakin kuatnya warna identitas ideologi yang ada antara pendukung dan lawan politik Presiden Jokowi akan sekiranya membuat instabilitas dalam proses pemerintahan dan juga rusaknya nilai-nilai pluralisme kebhinekaan.<sup>7</sup>

Hal ketiga yakni masalah favoritisme politik yang berkembang menjadi tendensi dinasti politik menjadi sinyalemen pamungkas adanya kemunduran dalam demokrasi. Pandemi sekarang ini telah memberikan legitimasi luar biasa bagi penguasa untuk melakukan segala daya dan upaya dalam mengatasi persoalan tersebut. Hal ini yang kemudian berdampak pada menguatnya ketergantungan yang kemudian terkonversi menjadi dukungan publik kepada petahana.<sup>8</sup> Oleh karena itulah, pemilu kemudian ajang legitimasi bagi penguasa dan keluarganya bahwa kapabilitas dalam soal pandemi ini memberikan sinyal positif terhadap elektabilitas calon dari keluarga inti. Persoalan ini sebenarnya adalah masalah klasik ketika peran partai politik telah berkurang drastis sementara faktor personalisasi tokoh semakin menguat.<sup>9</sup> Semakin penting dan berakarnya personalisasi politik ini berdampak pada sikap lebih mengutamakan / memfavoritkan anggota keluarga inti sebagai penggantinya. Menurut data yang dihimpun dari KPU, telah ada 16 pasangan kandidat kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elit politik petahana di Jakarta. Hal ini termasuk pula terpilihnya Bobby Nasution selaku menantu Presiden Jokowi menjadi Walikota Medan dan Gibran Rakabuming Raka selaku putra sulung Presiden Jokowi sebagai Walikota Solo.<sup>10</sup>





# THC INSIGHTS

No. 27 / 09 Juni 2021  
[www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)

Meskipun favoritisme politik lewat hubungan darah ini tidak selalu mengarah pada jalan menuju politik kekuasaan formal, setidaknya bisa menjadi refleksi bersama kalau nuansa politik Indonesia sendiri masih diwarnai dengan adanya persoalan kandidasi yang harus didukung oleh sumber material melimpah dan relasi hubungan personal dengan elit. Pola kekeluargaan dan transaksional ini yang nantinya membuat adanya sistem warisan kekuasaan. Hal ini yang sekiranya berdampak pada distribusi barang publik yang tidak merata. Adanya pandemi sekarang justru menjadi anugerah bagi mekanisme pelanggaran kekuasaan berbasis relasi keluarga dalam demokrasi. Kondisi sosial dan ekonomi yang masih belum menentu dan belum stabil menjadi celah legitimasi bagi para petahana mencalonkan para anggota keluarganya. Mekanisme bantuan sosial agaknya kemudian ditelikung sebagai ajang kampanye meraih simpati. Hal ini secara umum menunjukkan kalau efek ekor jas dengan mengandalkan kharisma elit itu adalah parameter utama dimana masih belum kuatnya sektor pemerintahan.

## Simpulan

Secara umum, ketiga faktor yang telah kita bahas sekiranya menjadi kontributor utama dalam turunnya kualitas demokrasi di tahun 2021. Secara jelas, kita bisa melihat cara pemerintah merespon pandemi itu justru malah berbuah semakin rakusnya elit politik dan semakin irasional anggota masyarakat dalam mematuhi aturan. Oleh karena itulah, adanya ketiga faktor di atas menjadi alasan penting adanya estimasi semakin turunnya kualitas demokrasi Indonesia.





## Daftar Pustaka

- 1 Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019. BPS Press.
- 2 The Economist Intelligence Unit. (2021). Democracy Index 2020 In Sickness and in Health? The Economist Press.
- 3 V-Dem Institute. (2021). Autocratization Turns Viral: Democracy Report 2021. V-Dem Institute.
- 4 Achmad Yahya. (2020 Juli 19). Presiden Jokowi Coret BIN di Bawah Koordinasi KemenkoPolhukam. Retrieved on 15 May 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/19/11015291/presiden-jokowi-coret-bin-di-bawah-koordinasi-kemenko-polhukam>.
- 5 Natalie Sambhie. (2021 January 22). Generals Gaining Ground: Civil-Military Relation and Democracy in Indonesia. Retrieved on 15 May 2021, from <https://www.brookings.edu/articles/generals-gaining-ground-civil-military-relations-and-democracy-in-indonesia/>
- 6 Greg Fealy, Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56, 301-323.
- 7 Marcus Mietzner, Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism, *Democratization*, 27, 1021–1036.
- 8 Ihsanuddin. (2020, October 24). Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi. Retrieved on 15 May 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/24/21300901/jokowi-ungkap-alasan-ruu-cipta-kerja-dikebut-di-tengah-pandemi?page=all>.
- 9 Eve Warburton. (2019). Polarization and Democratic Decline in Indonesia. in Thomas Carothers and Andrew O'Donohue. *The Global Challenge of Political Polarisation*. Brookings Institution Press.
- 10 Arlina, Arshad. (2020, December 14). Jokowi's Son-in-Law, New Medan Mayor, Is No Stranger to the Limelight. Retrieved on 15 April 2021, from <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jokowis-son-in-law-new-medan-mayor-is-no-stranger-to-the-limelight>





# THC INSIGHTS

**THC Insights** are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

**Contact:**

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: [thc@habibiecenter.or.id](mailto:thc@habibiecenter.or.id)

Website: [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)